

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- , *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan ke IV, 1993.
- A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Maju Mandar, Bandung, 1993.
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997)*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002
- Ali Achmad Chomzah. *Hukum Pertanahan*. Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Baharuddin Lopa, Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinargrafi, Jakarta, 1993.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernhard Limbong, *Reforma Agraria*, Pustaka Margareta, Jakarta, 2012.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Group, Seventh Edition, SP. PAUL, MINN, 1999.
- Djoko Prakoso, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Litbang, Yogyakarta, 1983.
- E. Utereich, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA UU No. 5 Tahun 1960*, Alumni, Bandung, 1995.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Gramedia, Jakarta, 2012.
- Harun Al Rashid, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (berikut peraturan-peraturan)*, Cipta Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- Maria S.W. Sumarjono, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, 1982.
- Martiman Projohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mudjiono, *Hukum Agraria*, Yogyakarta, 1992.
- Muhammad Yamin lubis dan Abd.Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung: 2010.
- Mustafa Bachsan, *Hukum Agraria Dalam perspektif*, Remaja Karya CV, Bandung, 1984.
- Nasution, M.A., *Azaz-Azaz Kurikulum*, Penerbit Ternate, Bandung, 1964.
- Peter Salim, *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, Modern English Press, Seventh Edition, Jakarta, 1996.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Pieter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta 2009.
- R. Subekti & R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta: 1971.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 1978, Proyek Penulisan Karya Ilmiah, BPHN, Binacipta, Bandung, 1978.
- R. Wiryono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Cetakan pertama, Jakarta, 2007.
- S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Grasindo, Jakarta: 2005.

- S. Prajudi Atmosudirdjo, *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara*, Kertas Kerja, BPHN, Binacipta, Bandung, 1977.
- S.F. Marbun, Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 1997.
- Sangsun Florianus, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visi Media, Jakarta, 2007.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung: 1985.
- Soedjono dan H. Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Tampil Ansari Siregar, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Multi Grafik, Medan, 2005.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Van Wijk- Konijnenbelt, *Hoofdstukken van administratief rechts*, p. 1. 1984.
- W. Irawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, 2003.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015

Zairin Harahap, 002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Jasa Grafindo Persada.

### **Undang-Undang**

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. tentang. Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara